

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tinggi, paling menguntungkan menjadi paling baik, menjadikan paling tinggi. Sehingga Optimalisasi merupakan suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau efektif.¹

Optimalisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kinerja kerja pada suatu unit kerja pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.² Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya untuk mewujudkan apabila dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif

¹ Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), hlm.800

² Nurrohman, B. 2017. Optimalisasi Pelayanan E-KTP guna Meningkatkan Validitas data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. Jurnal 10 No. 6. Banten STISIP Banten Raya Pandeglang. <http://stisipbantenraya.ac.id/index.php/download/cateory/7-jurnal-vol-10-no6-maret-2017>. Diakses pada tanggal 10 mei 2018

dan efisien agar optimal.³ Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi optimalisasi disini mempunyai arti berusaha secara optimal untuk hasil yang baik untuk mencapai dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah direncanakan. Optimal erat kaitanya dengan kriteria untuk menjadi hasil yang diperoleh hasil yang maksimal dengan kerugian yang minimal.⁴

Menurut Mohammad Nurul Huda Optimalisasi adalah berasal dari kata optimal adalah terbaik atau tertinggi. mengoptimalkan berarti menjadi paling baik atau paling tinggi. sedangkan optimalisasi merupakan proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau suatu yang paling tinggi. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.⁵

³ Winardi, 2014, *Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen*, Mandar Maju, Jakarta

⁴ Huda, Mohamad Nurul, *Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 6 (2018)

⁵ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyajakarta Graha Ilmu,2019), hal.4

Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan.⁶ Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

a. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimum atau minimum. Maksimum digunakan apabila tujuan pengoptimalisasi berhubungan dengan keuntungan, penerima, dan sejenisnya. Sedangkan minimum digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Untuk penentuan tersebut tertentu harus disesuaikan dengan apa yang akan dimaksimalkan atau diminimumkan⁷.

b. Alternatif keputusan

Alternatif keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan. *Alternatif* keputusan tersedia menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan juga dihadapkan dengan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik.⁸

Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi

⁶ Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*, (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 2019), hlm 363

⁷ Sidik, Machfud, 2001. *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip, Pelaksanaan di Berbagai Negara, serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah*. Batam : Sidang Pleno X ISEI, Hal. 8

⁸ Ibid, 8

banyak ditentukan oleh pengambilan suatu keputusan sekarang. pengambilan keputusan hendaknya dipahami dalam dua pengertian yaitu penetapan tujuan yang merupakan terjemahan dari cita-cita aspirasi dan pencapaian tujuan melalui implementasinya. Ringkasnya, keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan dan ini semua berintikan pada hubungan kemanusiaan.⁹

Menurut Gigch pencarian untuk menghasilkan alternatif tetap merupakan bagian yang harus dipahami. Salah satu teori mengatakan bahwa pencarian alternatif merupakan proses suatu rangkaian tujuan dan sasaran pertama kali yang dibuat untuk menjembatani jarak antara titik awal dan pencarian tujuan.¹⁰

Adair berpendapat bahwa keputusan-keputusan berpusat pada pengelolaan, dalam situasi manajemen tertentu suatu keputusan atau bagian keputusan harus mendahului pelaksanaan. Suatu keberhasilan dengan kegagalan pencapaian hasil bagaimana juga akan ditentukan dalam suatu keputusan dan efektivitas dalam pelaksanaan.¹¹

c. Sumberdaya yang dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas, keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkannya proses optimalisasi. Salah satu bentuk optimalisasi dalam mengatasi tenaga kerja. Dengan tujuan

⁹ J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, (Jakarta: PT Grasindo, 2020), hlm 32

¹⁰ Syafaruddin dan Anzizhan, *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm 51

¹¹ *Ibid*, hlm 48

mengurangi tingkat pengangguran yang ada, cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, ketrampilan penduduk lain, pengkajian potensi kesempatan kerja serta karakteristik pencari kerja, pembangunan pemukiman transmigrasi baru serta pembinaan. Peningkatan kualitas produktifitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi, peningkatan relevansi, kualitas dan efesiensi pelatihan kerja serta permasyarakatan nilai dan budaya produktif, pengembangan sistem dan metode peningkatan Produktifitas serta pengembangan kader dan tenaga ahli produktifitas.¹² Tujuan atau manfaat dari adanya suatu pengoptimalan adalah untuk mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan demikian, optimalisasi adalah suatu usaha guna memaksimalkan atau meminimalisasi untuk mencapai suatu tujuan dengan tepat dan efektif.

B. Pengembangan Masyarakat

1. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan gerakan suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah lama disadari sebagai hal yang penting dan perlu diwujudkan.

¹² Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung, Alfabeta 2019) hal 111

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat.¹³

Menurut Zubaedi, Pengembangan masyarakat adalah suatu usaha dalam mengembangkan suatu kondisi masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap dan aktif dan mengikuti sesuai dengan kaidah yang berkeadilan sosial dan saling menghargai antara satu sama lain. Pengembangan masyarakat bisa diartikan sebagai sebuah komitmen untuk menggerakkan masyarakat bisa diartikan sebagai komitmen untuk menggerakkan masyarakat kelas bawah agar masyarakat tersebut berdaya dan mampu mempersiapkan hidup dengan berbagai pilihan yang bisa membantu nantinya dimasa depan masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata yang menyangkut masa depan mereka.¹⁴

Menurut Darusman Pengembangan masyarakat adalah gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah satu upaya startegis dari banyaknya cara untuk membantu suatu masyarakat yang berada dalam mengalami berbagai

¹³ Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd. *Pengembangan masyarakat* (Cetakan ke, 1 Maret 2019) hlm 5-7

¹⁴ Zubaedi, 2013, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

permasalahan demi mencapai taraf hidup layak dan berkualitas. Pengembangan masyarakat sangat berguna untuk mengurangi serta menjadi solusi dari berbagai permasalahan sesuai kondisi dan kebutuhan nyata dengan alternatif solusi dan tepat sasaran.¹⁵

2. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat

Prinsip pengembangan masyarakat tampak sudah diperjelas sehingga bisa diketahui oleh siapa saja. Suatu contoh, pengembangan masyarakat bersandar pada pandangan bahwa masyarakat kurang beruntung bisa sepenuhnya mengendalikan kehidupannya seketika struktur-struktur dan lembaga-lembaga diubah. Untuk mengubahnya adalah dengan suatu yang menantang struktur kekuasaan yang sudah ada dan merebut kekuasaan dari kelompok dominan. Pengembangan masyarakat dengan berpijak pada kerangka konseptual yang dikembangkan oleh teori-teori sosial kritik. Tentunya saja penggunaan kerangka konseptual dari kalangan kritik seperti ini menjadikan diskursus pengembangan masyarakat terlibat dalam kompleksitas perdebatan.

Prinsip-prinsip yang dimaksud sebagai seperangkat prinsip dasar yang akan mendasari pendekatan pengembangan masyarakat bagi semua praktek kerja masyarakat.¹⁶

¹⁵ Darusman, Yus. Dkk (2019). Pengembangan Masyarakat Setiwargi Berbasis Potensi Daerah. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 5(1). 30-37. DOI :10.37058/jpls.v5i1.1967

¹⁶ Dr. Zubaedi, M.Ag., M,Pd. *Pengembangan masyarakat* (Cetakan ke, 1 Maret 2019) hlm 29-41

a. Pembangunan Menyeluruh

Pembangunan sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan personal/spritual, semuanya mencerminkan aspek-aspek penting dari kehidupan masyarakat. Program pengembangan masyarakat harus memperhatikan keenam aspek tersebut. Hal ini berarti bahwa keenam aspek berjalan secara bersama-sama dan mendapat porsi yang sama, tetapi mungkin salah satu diprioritaskan dengan tidak boleh meninggalkan yang lain. Salah satu contohnya pembangunan ekonomi tidak boleh meninggalkan kelima aspek-aspek pembangunan yang lain. Pembangunan masyarakat yang hanya mengkonsentrasikan pada satu aspek saja, akan menghasilkan pembangunan yang tidak lengkap. Oleh karena itu hal yang paling penting bagi pekerjaan masyarakat adalah selalu ke enam aspek tersebut secara bersama-sama.

b. Melawan Kesenjangan Struktur

Pengembangan masyarakat hendaknya peduli terhadap beraneka praktek penindasan kelas, *gender* dan ras. Sebagai konsekuensinya, pengembangan masyarakat tidak akan menimbulkan penindasan struktural baru. Oleh karena itu, para aktivis sosial harus mencermati praktek-praktek penindas yang kemungkinan terjadi dalam institut media, sistem sosial, struktur organisasi, bahasa, ekonomi, pasar dan iklan.

c. Hak Asasi Manusia

Pengembangan masyarakat harus menjunjung tinggi penghargaan hak asasi manusia. Hal asasi manusia perlu memperoleh perhatian secara

serius bagi pekerja masyarakat, baik dalam pandangan negatif maupun positif. Dalam pandangan negatif, hak asasi manusia adalah penting bagi pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, setiap program pengembangan masyarakat harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi dasar umat manusia. Dalam suatu pandangan yang positif, para aktivis pengembangan masyarakat menjadikan Deklarasi Universal dan Hak-hak Asasi manusia sebagai tujuan pengembangan masyarakat.

d. Berkelanjutan

Pengembangan masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk membangun tatanan sosial, ekonomi dan politik baru, yang prosesnya dan strukturnya secara berkelanjutan. Setiap kegiatan pengembangan masyarakat harus berjalan dalam kerangka berkelanjutan, bila tidak ia tidak akan bertahan dalam waktu yang lama. Keistimewaan dari prinsip-prinsip berkelanjutan adalah ia dapat membangun struktur, organisasi, bisnis, dan industri yang dapat tumbuh dan berkembang dalam berbagai tantangan.

e. Pemberdayaan

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Strategi pemberdayaan yang lengkap menuntut bahwa hambatan, yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan kekuatan yang dipahami, diperhatikan dan dipecahkan.

f. Kepemilikan Masyarakat

Dasar yang dipengangi dalam kegiatan pengembangan masyarakat adalah konsep kepemilikan bersama. Kepemilikan bisa dipahami dari dua tingkatan yaitu kepemilikan terhadap barang material serta kepemilikan struktural dan proses seperti kontrol masyarakat, pelayanan masyarakat, pendidikan, menentukan kebijaksanaan keaktifan lokal, dan pengembangan lokal.

g. Kemandirian

Masyarakat hendaknya mencoba memanfaatkan secara mandiri terhadap sumber daya yang dimiliki seperti: keuangan, teknis, alam dan manusia dari pada menggantungkan diri kepada orang lain.

h. Kebebasan dari Negara

Prinsip kemandirian memunculkan isu menyangkut hubungan masyarakat dengan negara. Negara ikut campur dalam pengembangan masyarakat merupakan sebuah tradisi yang lama. Respon alamiah dari sebuah pemerintah dalam merasakan kebutuhan pembangunan masyarakat adalah menciptakan berbagai program pembangunan masyarakat yang didukung oleh negara.

i. Tujuan Langsung dan Visi yang Besar

Dalam pekerjaan masyarakat selalu ada pertentangan antara pencapaian tujuan langsung seperti penghematan sumber daya alam dan visi besar berupa penciptaan kondisi masyarakat yang lebih baik. Dalam pengembangan masyarakat, kedua elemen tersebut merupakan hal yang

esensial untuk diwujudkan dalam rangka mempertahankan keseimbangan program jangka pendek dan jangka panjang.

j. Pembentukan Masyarakat

Semua pembangunan masyarakat harus bertujuan untuk membentuk sebuah masyarakat yang baru. Pembentukan masyarakat melibatkan upaya penguatan interaksi sosial dalam masyarakat membangun kebersamaan dan membantu mereka berkomunikasi dengan sesama.

k. Proses dan hasil

Proses itu harus sendiri penting dalam menentukan suatu hasil. Cara-cara kekerasan atau tidak berprinsip akan merusak tujuan. Proses harus merefleksikan tujuan, sebagaimana hasil akan merefleksikan proses tertentu.

l. Integritas Proses

Proses yang digunakan untuk mengembangkan masyarakat sama penting dengan hasil yang ingin di capai. Oleh sebab itu, proses yang digunakan untuk mencapai tujuan harus menyesuaikan dengan pengharapan dari hasil yang berkenaan dengan isu berkesinambungan.

m. Tanpa Kekerasan

Proses tanpa kekerasan perlu digunakan dalam membangun sebuah masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian, Tujuan-tujuan perdamaian tidak dapat dipenuhi dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

3. Strategi Pengembangan Masyarakat

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung) dan transformasi.¹⁷

a. Strategi *Tradisional*

Strategi ini untuk menyerangkan agar masyarakat mengetahui dan memiliki kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan pihak.

b. Strategi *Direct-Action*.

strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh seseorang atau semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi pada semua orang. Pada strategi ini, ada pihak yang pengaruh dalam membuat keputusan.

c. Strategi *Transformatif*

strategi ini untuk menunjukkan bahwa pendidikan masa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifisian untuk kepentingan sendiri.

¹⁷ Hanna, robinson, Hikmat, (2006), Pengaruh Utama Partisipasi Masyarakat, C.V.Cepruy, Jakarta Hal, 54.

4. Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat mempunyai fungsi strategis selain mampu memunculkan kesadaran juga potensial menguatkan kapasitas sehingga masyarakat berdaya keluar dari jerat kondisi keertinggalan, kebelakangan, ketunaan, kebodohan, ketakberdayaan dan kemiskinan. Beberapa fungsi strategis dari pengembangan masyarakat.¹⁸

- a. Memberikan pelayanan sosial yang berbasis kepada masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.
- b. Menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk berkerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- c. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh deskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.
- d. Menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan termasuk memfasilitasi partisipasi warga agar aktif terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.

¹⁸ Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka pelajaran, 2019), hlm. 28-29

5. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Tujuan umum pengembangan masyarakat dapat menentukan proses dan orientasi pengambilan keputusan keberlanjutan kegiatan pengembangan masyarakat. Beberapa tujuan umum dari pengembangan masyarakat.¹⁹

- a. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadilan.
- c. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya.
- d. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata
- e. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketergantungan dan kemerosatan moral.
- f. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.
- g. Mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan kerawanan pangan dan kegagalan panen.
- h. Memperkuat daya saing masyarakat di pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional yang kompetitif.
- i. Mengurangi angka pengangguran.

¹⁹ Ibid., hlm. 36-37

- j. Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga *grass roots*
- k. Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.
- l. Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kerakyatan.
- m. Mengembangkan masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.
- n. Menkuatkan kesadaran masyarakat agar tidak bergantung pada pihak donor atau pemberi dana bantuan.

C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR.NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan beradilan. Selanjutnya dibuatkan pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui UU NO.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke

Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:²⁰

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha Besar merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

²⁰ Yuli Rahmini Suci Jurnal *Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah di Indonesia* tahun 2017 hlm

Menurut Warkum Sumitro, Usaha mikro, kecil dan Menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya padangan²¹. Menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya yang berjudul Usaha atau Kewirausahaan adalah tindakan yang kreatif untuk membangun suatu nilai dari sesuatu yang tidak ada Entrepreneurship adalah proses mengungkap dan mewujudkan peluang yang menanggung resiko sebelumnya telah diperhitungkan.²²

Terdapat berbagai macam bentuk dari kegiatan usaha antara lain usaha jasa, usaha dagang, usaha industri, usaha pengolahan, dan lainnya. Usaha jasa adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang melayani masyarakat dengan memberi pelayanan berupa jasa. Contohnya jasa angkutan, konsultan, jasa akuntan, bengkel dan lain sebagainya. Usaha dagang adalah suatu bentuk kegiatan usaha membeli barang untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh profit atau keuntungan misalnya adalah tokoh serba ada, tokoh kelontong dan lainnya. Usaha industri adalah suatu kegiatan usaha yang mengubah bentuk dari bahan yang masih mentah menjadi barang setengah jadi maupun jadi yang siap untuk digunakan, misalnya rumah makan, pondok sembako, cafe dan lainnya.²³ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah produktif

²¹ Sumitro, Warkum. 2004. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait : Bamus, Takaful Dan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Ed. Revisi, Cet. 4. 979-421-511-2

²² Menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya yang berjudul Usaha atau Kewirausahaan. Jakarta 24 Mei 2019 hlm 155

²³ *Ibid.*

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan dengan semua badan usaha di semua sektor ekonomi.

2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (Undang-undang Nomor 20 tahun 2008).²⁴ Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu)

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta, dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.

Secara umum, tujuan yang kami inginkan tercapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tanggung dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi pasar persaingan bebas.²⁵

3. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, UMKM sangat memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya kelompok

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah Pasal 1*

²⁵ Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan islam dan lembaga-lembangan* Terkait (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2019), hlm. 168

usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto paling besar dibanding kontribusi dari usaha besar.²⁶

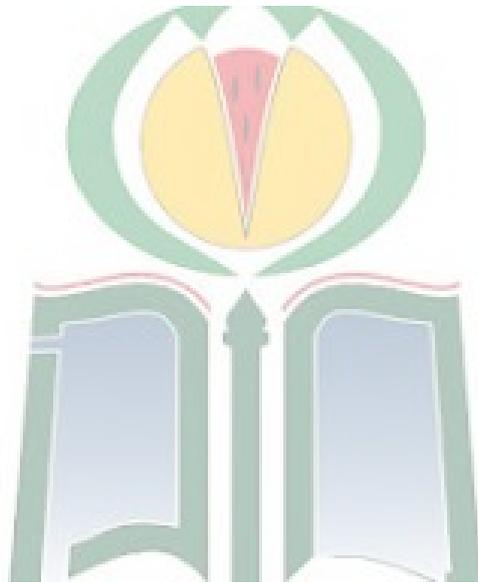
Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki suatu peran yang sangat penting sebagai sektor ekonomi rakyat yang berkaitan langsung dengan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya suatu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diharapkan dapat mendorong perkembangan disektor lainnya. Jumlah saat ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sangat meningkat dapat membuka peluang kerja yang lebih luas sehingga akan semakin meningkatkan kerja lebih yang lebih luas sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sangat meningkat dapat membuka peluang kerja yangf lebih luas sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan akan mendorong daya beli masyarakat dengan begitu perekonomian daerah akan ikut meningkat. Jadi, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang semakin banyak akan menyerap tenaga kerja yang semakin besar dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan begitu terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga jumlah penduduk miskin sangat berkurang²⁷.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor penting dalam kemakmuran masyarakat. Ketika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat

²⁶ Tulus Tembunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, hal.30.

²⁷ Fajri Novi Anugera dan Ida Nuraini Jurnal peran umkmdalam menanggulangi kemiskinan No.1 Tahun 2021 hlm 27-41

terwujud maka saat itulah pendapatan masyarakat mencapai maksimum, namun jika menganggur atau tidak bekerja akan mengurangi pendapatan yang mana tingkat kemakmuran yang dicapai akan berkurang sehingga menyebabkan buruknya kesejahteraan masyarakat. Semakin besar tenaga kerja yang terserap maka semakin banyak pula masyarakat yang memiliki pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar kategori miskin Artinya, suatu penyerapan tenaga kerja akan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah tersebut.²⁸



²⁸ Fajri Novi Anugera dan Ida Nuraini Jurnal peran umkmdalam menanggulangi kemiskinan No.1 Tahun 2021 hlm 27-41